

## Bukan Hanya Rusia, Ukraina Juga Ternyata Lagi Pusing soal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina disebut-sebut mulai mengalami beberapa masalah perekrutan militer. Ini merupakan masalah klasik yang melanda Rusia sejak negara itu menyerang tetangganya tersebut. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengumumkan telah memblokir 26 saluran Telegram yang diduga membantu masyarakat usia militer menghindari mobilisasi pada Rabu (8/3/2023). Berita tersebut muncul menyusul laporan The Economist pada 26 Februari yang menyebut Ukraina telah meningkatkan aktivitas mobilisasi dalam dua bulan pertama tahun 2023. Laporan tersebut lebih lanjut memerinci bahwa mobilisasi di Ukraina telah menjadi semakin agresif. Ini terlihat dari laporan draf pemberitahuan yang dikeluarkan pada pemakaman militer dan pejabat yang berpatroli di resor ski untuk masyarakat yang menghindari panggilan wajib militer. The Economist juga menulis dalam bahwa mobilisasi di Ukraina telah berlangsung sejak awal perang, tetapi sekarang ada perbedaan dalam hal siapa yang direkrut. "Pada gelombang pertama sebagian besar perekrutan dilakukan secara sukarela; antrean di luar kantor wajib militer sering terlihat. Sekarang para pejabat merekrut dari kerumunan yang jauh lebih tidak antusias," tulis majalah tersebut, sebagaimana dikutip Newsweek . Pengumuman SBU mengenai penutupan saluran Telegram mengatakan akun tersebut memberikan informasi tentang kehadiran petugas wajib militer di berbagai komunitas untuk memungkinkan masyarakat usia wajib militer menghindari panggilan wajib militer. Dinas Keamanan menambahkan bahwa administrator saluran Telegram diperingatkan bahwa mereka dicurigai terlibat dalam kegiatan kriminal dan dapat menghadapi hukuman 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Banyaknya korban jiwa yang terjadi selama pertempuran di beberapa lokasi seperti Bakhmut dikutip sebagai salah satu alasan mengapa militer Ukraina mencari lebih banyak masyarakat wajib militer. Alasan lain yang disebutkan adalah militer Ukraina membutuhkan lebih banyak pasukan untuk mengoperasikan masuknya senjata yang disediakan oleh sekutu Barat. Beberapa orang Ukraina yang berharap untuk menghindari wajib militer diduga ikut serta dalam pernikahan palsu, membayar dokter untuk pembebasan medis, atau melarikan diri ke negara lain. "Namun, keinginan untuk tindakan semacam itu turun setelah serangkaian penuntutan

penghindaran draf yang dipublikasikan dengan baik," tulis media itu lagi. Sementara itu, militer Presiden Rusia Vladimir Putin telah berjuang untuk mengisi barisannya sejak negara itu memulai invasi ke Ukraina lebih dari setahun yang lalu. Setelah Putin pertama kali membantah menggunakan wajib militer dalam perang, kementerian pertahanannya mengakui beberapa orang wajib militer telah dikirim ke dalam konflik sejak Maret 2022. Pada September, Rusia memanggil lebih dari 300.000 mantan tentara dengan mobilisasi pertamanya sejak Perang Dunia II. Akibatnya, lebih dari 370.000 orang Rusia meninggalkan negara itu dalam dua minggu setelah dekrit mobilisasi Putin.